



Bali Post/nik

AKP Anom Danujaya

Korupsi

Dua Kasus Per Tahun

APARAT Reskrim Polres Gianyar kini makin gencar menyoroti kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polres Gianyar. Hingga Juli 2015, sudah ada tiga berkas kasus korupsi yang kini dalam proses penyelidikan. "Kalau sekarang kami sedang menyelidiki tiga dugaan kasus korupsi yang sudah terjadi di Gianyar," ungkap Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Dewa Putu Gede Anom Danujaya, Jumat (10/7) kemarin.

Namun mantan Kasat Reskrim Polres Karangasem ini belum mau membeberkan secara rinci ketiga kasus tersebut, lantaran masih menunggu hasil audit dari BPK untuk memastikan jumlah kerugian. "Ini masih penyelidikan, kami juga masih menunggu hasil dari tim audit, untuk membuktikan kerugian sehingga nanti dapat memastikan tersangka," ucapnya.

AKP Anom Danujaya menambahkan, jajarannya kini akan mempercepat penanganan kasus korupsi, terlebih Polda Bali sudah menargetkan bahwa setiap Polres harus menuntaskan minimal dua kasus korupsi per tahunnya. "Untuk mempercepat gerakan, beberapa waktu lalu kami juga menandatangani MoU dengan sejumlah LSM dan MUDP, untuk turut serta menyoroti dan melaporkan bila menemukan adanya indikasi korupsi," katanya.

Dikatakannya, hingga Juli 2015 unit Tipikor Satreskrim Polres Gianyar sudah menetapkan P21 untuk satu kasus korupsi. Selain itu satu berkas kasus korupsi juga sudah memasuki proses penyidikan. "Selain ada yang sudah di P21, ada juga kasus yang sudah masuk dalam proses penyidikan dan berkasnya sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Gianyar," ujarnya. (nik)

Edisi : Sabtu, 11 Juli 2014

Hal : 11



Tersangka Kasus Undiksha Ajukan Penangguhan Penahanan

DENPASAR, NusaBali

Pasca dijebloskan ke Lapas Kelas IIA, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, satu tersangka dugaan korupsi mark up lahan Universitas Ganesha (Undiksha) Singaraja yaitu I Wayan Suarsa langsung melayangkan surat penangguhan penahanan pada Jumat (10/7).

Surat penangguhan penahanan tersebut dibawa langsung kuasa hukum Suarsa, Andrias Manalu ke Kejati Bali pada Jumat (10/7) siang. Surat permohonan penangguhan penahanan dengan nomor 007/ASM&P/VII/2015 langsung diserahkan ke penyidik. "Sudah saya serahkan surat penangguhan penahannya," tegas Andrias, kemarin.

Dijelaskannya, dalam surat tersebut, kliennya yang bernama I Wayan Suarsa, 51, beralamat di Jalan Pulau Menjangan, Gang Jelantik, Kelurahan Banyuning, Buleleng mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan jenis tahanan. Beberapa pertimbangan diajukan dalam permohonan ini. Diantaranya, Pasal 31 KUHP atas permintaan tersangka, terdakwa, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan kewenangannya masing-masing dapat menanggukhan penahanan, berdasarkan syarat yang ditentu-



I Wayan Suarsa (tengah) digiring petugas Kejaksaan untuk jalan penahanan, Kamis (9/7).

kan oleh yang berwenang. Selain itu, tersangka adalah kepala rumah tangga yang sangat dibutuhkan oleh istri dan anaknya. "Tidak ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menyulitkan pemeriksaan atau melakukan tindak pidana lain," bebarnya.

Selain kuasa hukum, istri Suarsa

yaitu Ni Ketut Asmini, 49, juga siap menjadi penjamin penangguhan penahanan ini. "Kami berharap permohonan penangguhan penahanan ini bisa dikabulkan. Kami juga siap sebagai penjamin dan bertanggung jawab tersangka dapat dihadirkan, dihadapkan, tidak akan menyulitkan pemeriksaan, tidak akan melarikan

Edisi : SENIN, 11 Juli 2015
Hal : 5



diri sendiri serta mentaati aturan,"
pungkas Andris.

Seperti diberitakan sebelumnya, I Wayan Suarsa akhirnya ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali pada Kamis (9/7). Selain Suarsa, satu tersangka lainnya yaitu I Nyoman Mustiara ditunda penahanannya karena masih berada di luar kota. Selain dua tersangka ini, penyidik juga sudah menetapkan tiga tersangka lainnya. Yaitu, Nengah Nawa (Kepala Desa Jineng Dalem), Sri Putu Sugirinata (Kabag Perencanaan Undiksha) dan I Dewa Komang Indra (makelar tanah). Dalam kasus ini, kelima tersangka melakukan persekongkolan untuk mark up harga tanah untuk pengadaan lahan Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha di Jineng Dalem seluas 3,7 hektare pada 2010 lalu. Dalam aksinya, kelima tersangka melakukan mark up harga tanah dari harga Rp 6,5 juta per are menjadi Rp 18 juta per are.

Parahnya lagi, tanah yang digunakan untuk kampus Undiksha ini baru dikuasakan menjual oleh kelima tersangka. Lalu tanah ini akhirnya dilunasi setelah alokasi dana Rp 7 miliar untuk pengadaan lahan ini cair. Dari perhitungan inilah ada kerugian negara mencapai Rp 3 miliar. **rez**

Edisi : _____
Hal : _____



Aparat Desa Keberatan Upah Pungut Pajak ✓

★ Dapat Rp 70 Ribu, Bikin Rekening Rp 100 Ribu

SINGARAJA, NusaBali

Upah pungut (UP) atas pajak bumi dan bangunan (PBB) yang biasa diterima oleh aparat desa, tahun ini belum bisa dibagikan. Masalahnya, aparat desa keberatan dengan sistem pembagian UP tersebut.

Informasinya, aparat desa setiap tahunnya mendapat UP atas jasa mereka menyebar surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT) PBB termasuk memungut pajaknya dari wajib pajak (WP). Nilai UP yang diterima atas jasa mereka dihitung berdasarkan prosentase sebesar 1 persen dari total pajak yang dipungut. Semula, pembayaran UP diberikan langsung kepada petugas yang bersangkutan. Namun sejak tahun 2015, terbit aturan baru dimana UP yang diberikan kepada aparat desa termasuk petugas pungut lainnya harus ditransfer langsung ke rekening masing-masing.

Nah, kebijakan inilah yang membuat aparat desa sebagai salah satu petugas pungut terbawah keberatan. Masalahnya, mereka harus membuat rekening masing-masing dengan biaya minimal sebesar Rp 100 ribu. Sedangkan UP yang mereka terima rata-rata hanya sebesar Rp 70 ribu. Imbasnya, mereka pun

ogah-ogahan dalam membantu pemungutan PBB. "Hitungannya kan mereka rugi, ketimbang merugi lebih baik mereka tidak terima UP tersebut," terang Ketua Komisi III DPRD Buleleng, Ni Made Putri Narani, usai dengar pendapat dengan Dinas Pendapatan (Dispenda) Buleleng, Senin (10/8).

Politisi Nasdem asal Desa Les, Kecamatan Tejakula ini mengaku, dirinya juga mendapat informasi dari aparat desa terkait dengan pembayaran UP. Dikatakan, aparat desa kini sedang binggung dengan system pembayaran UP tersebut. "Jelas kebijakan ini merugikan aparat desa, bayangkan mereka harus keluar uang lebih besar dari pada UP yang diterima. Kok buat kebijakan tidak melihat kondisi di masyarakat dulu," ujarnya.

Sementara Kepala Dispenda Kabupaten Buleleng Ida Bagus Puja Erawan yang dikonfirmasi usai pertemuan mengakui, jika UP tahun 2015 belum bisa dibagikan kepada petugas pungut termasuk aparat desa, karena masih ada keberatan. Pihaknya pun sudah merencanakan untuk berkonsultasi ke pemerintah pusat terkait dengan system pembayaran tersebut.

"Memang kami akui, tidak layak kalau memang pembayaran UP itu harus membuka rekening, kami sadari hal itu, makanya kami akan konsultasikan lagi persoalan ini ke pusat," terangnya.

Menurutnya, dalam konsultasi tersebut pihaknya berharap ada perubahan regulasi terkait dengan pembayaran UP tersebut. Sehingga UP untuk tahun 2015 bisa dibayarkan kepada petugas pungut termasuk aparat desa. "Ini kan kebijakan pusat, makanya kita konsultasi ke pusat. Ya agar ada penjelasan terkait dengan pembayaran UP itu," kata mantan Sekretaris DPRD Buleleng ini.

Disinggung dampak realisasi PBB atas sikap aparat desa sebagai akibat regulasi pembayaran UP? Kadispenda Puja Erawan menegaskan, imbasnya tidak terlalu besar, karena pihaknya sudah mengantisipasi hal tersebut. Sejauh ini, realisasi PBB sudah sesuai dengan target pencapaian setiap semesternya. **k19**



• NUSABALI/SUDIRTA

KADISPENDA Buleleng Ida Bagus Puja Erawan memberikan penjelasan dalam dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Buleleng kemarin.

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015
Hal : 4



Bansos Terhambat, Dewan Minta Gugat

Dewan menilai atas berlakunya undang-undang tersebut, aktivitas di desa adat terganggu, karena pemerintah tidak lagi berani menyalurkan bantuan sosial.

AMLAPURA, NusaBali

Sebagian anggota DPRD Karangasem meminta agar eksekutif atau pihak terkait melayangkan gugatan terhadap berlakunya UU No 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah. Terutama yang memuat, tata cara pengalokasian bantuan sosial, hanya untuk lembaga berbadan hukum. Sebab, atas berlakunya undang-undang tersebut, aktivitas di desa adat terganggu, karena pemerintah tidak lagi berani menyalurkan bantuan sosial.

Hal ini diungkapkan anggota DPRD Karangasem, I Gede Dauh Suprpta yang mengajak segenap anggota DPRD Karangasem menyuarakan hal itu ke pusat, dalam di Rapat Pembahasan draf APBD 2016, di DPRD, Senin (10/8). "Tujuan melayangkan gugatan agar ada revisi UU No 23 tahun 2014, sehingga bantuan sosial bisa tersalurkan di

masyarakat," pinta Dauh Suprpta politis PDIP dari Kecamatan Kubu.

Menanggapi wacana dari Dauh Suprpta itu, anggota DPRD dari Partai Golkar, I Komang Rena, juga memberikan dukungan. Menurutnya UU No 23 tahun 2014, dinilai kurang relevan. "Nantinya pencairan bansos untuk konstituen jadi terhambat," jelas Rena, yang anggota dewan dari Desa Pempatan,



• NUSABALI/NANTRA

I Gede Dauh Suprpta (kanan) di Rapat DPRD, Senin (10/8).

Kecamatan Rendang itu.

Anggota DPRD dari Partai Golkar lainnya, I Nengah Sudarsa lain lagi tanggapannya. "Yudisial review UU No 23 tahun 2014, itu urusan pusat ke MK. Bagi yang terlanjur berjanji kepada konstituen, agar menalangi terlebih dahulu, itu risiko politik," kilah Sudarsa.

Anggota lainnya I Gede Pasek Bendesa Mulyawan, mengaku menerima apa adanya mengenai UU No 23 tahun 2014, tersebut telah diundangkan. "Kita terima saja begitu adanya," ujar Bendesa Mulyawan.

Sementara itu, Sekkab Karangasem I Gede Adnya Mulyadi menanggapi dingin atas desakan anggota DPRD Karangasem soal gugatan itu. "Satu-satunya cara merevisi UU No 23 tahun 2014, dengan mengajukan Yudisial review ke MK. Sementara, karena ketentuan itu berlaku, hanya lembaga yang berbadan hukum saja berhak dapat bansos," jelas Adnya Muliadi.

Bansos, kata dia, terbagi menjadi dua yakni bansos terencana

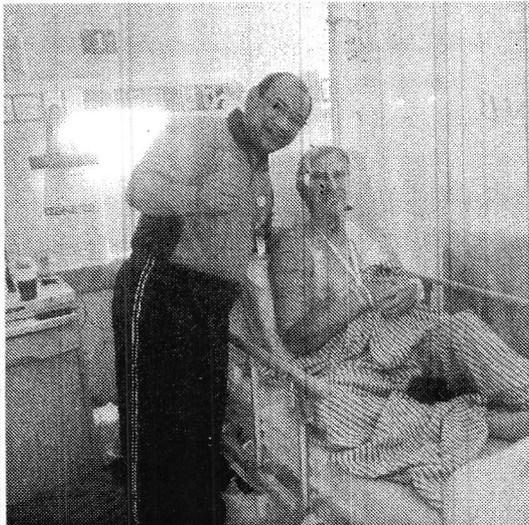
dan bansos tidak terencana. "Bansos tidak terencana biasanya untuk korban bencana alam, atau untuk korban gizi buruk, busung lapar dan sebagainya," kata Adnya Muliadi. Dia kemudian membeberkan beberapa lembaga berbadan hukum yang berhak dapat bantuan sosial: Pramuka, Pemuda Pancasila, FKUB, Manasik Haji dan sebagainya.

Sekadar mengingatkan, bansos senilai total Rp 4 miliar di APBD Perubahan 2015 Kabupaten Karangasem, terancam mubazir akibat terganjal dalam teknis pencairan. Sebab, pencairannya mesti kepada lembaga berbadan hukum, mengacu UU No 23 tahun 2014. Eksekutif diingatkan agar tidak memaksakan pencairan bansos itu, kalau tidak ingin berekses hukum, atau masuk penjara.

Dewan mengingatkan itu agar tidak terjadi temuan di kemudian hari. Apalagi, pejabat eksekutif belakangan ini satu per satu mulai diadili gara-gara kesalahan prosedur dalam mengelola keuangan negara. **k16**



Dari BPJS, Rumah Sakit Dapat Rp 3 Miliar Sebulan. ✓ Ekspatriat Juga Tertarik Gunakan BPJS



• IST
DIRUT RSUD Mangusada Badung dr Agus Bintang Suryadi bersama pasien BPJS asal Belanda, Piter Bleeck.

MANGUPURA, NusaBali

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mangusada Badung melayani ribuan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per bulannya. Ternyata peminat pelayanan kesehatan gratis ini tak hanya warga lokal tetapi juga

diminati ekspatriat. Salah satunya warga negara Belanda bernama Piter Bleeck yang menderita patah tulang lengan bagian kanan dan dirawat beberapa hari di Ruang Janger.

"Rata-rata kunjungan pasien BPJS per bulan 3.850 orang untuk yang rawat jalan. Sedangkan untuk rawat inap 415 orang, dan kunjungan ke IGD sebanyak 892 orang," ungkap Dirut RSUD Mangusada Badung dr Agus Bintang Suryadi didampingi Kepala Bidang Pelayanan RSUD Badung dr Made Nuriya, Senin (10/8).

Menurut dr Bintang, klaim pembayaran dengan pasien BPJS sebanyak itu mencapai miliaran rupiah. "Pastinya saya lupa. Tapi kurang lebih setiap bulannya itu antara Rp 3 miliar sampai Rp 3,5 miliar," jelasnya. Yang menarik, imbuh pria asal Kelurahan Lukluk,

Mengwi, pasien BPJS yang ditangani tidak hanya warga lokal, sebab belakangan ada juga pasien warga negara asing.

Kasus langka itu sempat membuat pihak rumah sakit cukup kaget karena tidak wajar pasien BPJS yang dirawat di

rumah sakit adalah warga negara asing. Bahkan ekspatriat bernama Piter Bleeck telah dirawat 10 hari dan diperkenankan pulang sejak kemarin. "Saya juga kaget ada bule pakai BPJS. Ini baru pertama kali ada di rumah sakit ini," kata dr Bintang.

Menurut dia, ekspatriat berumur 75 tahun itu diketahui tinggal di Nusa Dua, Kuta Selatan. Walaupun warga negara asing hal itu tidak ada masalah.

Nuriya menambahkan, pihaknya tidak bisa menolak karena sesuai Undang-undang BPJS Kesehatan, turis asing yang telah enam bulan lebih tinggal di Indonesia, maka bisa menggunakan pelayanan BPJS. "Maka dari itu kami tidak menolak pasien BPJS bernama Piter Bleeck itu. Justru kami tangani sama seperti pasien lainnya," imbuhnya.

Nuriya menyatakan pasien atas nama Piter Bleeck itu diketahui mengalami patah tulang lengan sebelah kanan. Bersamaan dengan itu Piter Bleeck juga menderita sesak napas. "Untuk operasi patah tulangnya dilakukan dengan mulus," tegasnya. Dia menambahkan, ekspatriat tersebut tak dipungut sepeser pun biaya alias gratis. Setelah kondisi membaik, Piter Bleeck diperbolehkan pulang, Senin pagi kemarin. as

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015

Hal : 2



Dewan Bahas R-APBD 2016

Rp 1,35 Triliun

AMLAPURA, NusaBali

Pihak eksekutif Kabupaten Karangasem melalui Sekkab I Gede Adnya Muliadi, menyerahkan draf APBD 2016 sebesar total Rp 1,359 triliun. DPRD Karangasem kini tengah membahas draf tersebut dengan dimulai dalam rapat dipimpin Ketua I Nengah Sumardi, dalam agenda rapat membahas KUA dan PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara).

Dalam pembahasan tersebut, yang agak alot hanya menyangkut anggaran bantuan sosial, sehubungan diberlakukannya UU No 23 tahun 2014, mesti pengalokasiannya kepada lembaga berbadan hukum. Hal itu terungkap dalam rapat di Gedung DPRD Karangasem, Senin (10/8).

Belanja daerah Rp 1,359 triliun tersebut, menurut Sekkab Adnya Muliadi, mengalami kenaikan di bandingkan tahun 2015 yang hanya memuat Rp 1,269 triliun, kenaikan-

nya Rp 89,725 miliar.

Belanja daerah itu terbagi menjadi dua, yakni belanja tak langsung atau non fisik sebesar Rp 912,85 miliar di antaranya untuk: belanja bunga Rp 5 miliar, belanja hibah Rp 23,589 miliar, bantuan sosial

Rp 955 juta, belanja pegawai Rp 12,639 miliar.

Sedangkan belanja langsung atau fisik, sebesar Rp 446,36 miliar, yang terbagi tiga: belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.



Ketua DPRD I Nengah Sumardi (kiri) usai rapat dengan jajaran eksekutif di DPRD, Senin (10/8).

Untuk belanja barang dan jasa alokasinya Rp 236,147 miliar, belanja modal Rp 117,11 miliar dan sebagainya.

Adnya Muliadi, juga menyebutkan alokasi untuk bayar utang Rp 24 miliar, dana itu didapatkan dari PAD (pendapatan asli daerah) yang targetnya di tahun 2016 Rp 213,609 miliar, mengalami kenaikan dari tahun 2015 Rp 205,273 miliar. "Pendapatan lainnya, dari DAU (dana alokasi umum) Rp 633,24 miliar dan DAK (dana alokasi khusus) Rp 69,84 miliar," jelas Adnya Muliadi.

Ketua DPRD I Nengah Sumardi menyambut positif draf APBD 2016, yang mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2015. "Kita sepakati alokasi anggaran itu, tinggal membahas secara detail di masing-masing SKPD sesuai draf yang telah eksekutif setorkan. Sehingga dalam pembahasan lebih lanjut, anggaran bisa bergeser-geser, dengan total nominal tidak

berubah," jelas Sumardi.

Anggota DPRD I Komang Sartika, juga mendukung atas terjadinya pergeseran anggaran sesuai kebutuhan dan aspirasi di setiap pembahasan. "Ini kan dana secara umum, gelondongan, nanti lebih rinci dalam pembahasan secara detail," kata Sartika.

Walau anggaran itu mendapat persetujuan anggota DPRD, setidaknya eksekutif tetap diingatkan, agar ada timbal balik antara anggaran yang ke luar dengan manfaatnya. Anggota dewan, I Wayan Suastika misalnya, mengingatkan anggaran KONI Karangasem Rp 2,5 miliar, agar ada timbal baliknya dengan prestasi. "Anggaran sudah dapat persetujuan, hendaknya KONI membalas dengan prestasi," harap Suastika.

Sekcab Adnya Muliadi menanggapi. "Anggaran KONI itu untuk pembinaan atlet di setiap cabang olahraga, dan untuk kegiatan," jelasnya. @k16



Dewan Temukan Banyak Persoalan di RSUD Mangusada, Buka Super VIP, Minim Dokter Spesialis

Paviliun Mangusada ditujukan untuk layanan VIP, VVIP, super VIP. Tetapi RS milik Pemkab Badung itu masih kekurangan sejumlah dokter spesialis.

MANGUPURA, NusaBali

DPRD Badung yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Mangusada, Senin (10/8), menemukan beberapa persoalan serius. Misalnya soal keterbatasan dokter ahli atau dokter spesialis, Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras yang terkesan tumpang tindih. Sementara untuk tahapan perekrutan tenaga kontrak dinilai sudah lebih baik.

Rombongan dewan yang di-

pimpin Wakil Ketua DPRD I Made Sunarta dan Ketua Komisi IV I Nyoman Sutrisno, diterima oleh Direktur RSUD dr Agus Bintang Suryadhi. Hadir anggota Komisi IV seperti IB Sunartha, Putu Parwata, Luh De Suryani, I Gusti Anom Gumanti, Senata, dan Suharaja.

Menurut Sunarta, pascarampungnya gedung E Paviliun Mangusada ada beberapa hal penting yang jadi fokus perhatian Komisi IV DPRD Badung. Di antaranya adalah masalah penataan peralatan di gedung E. Menurutnya piranti gedung E yang menyediakan pelayanan VIP, VVIP, dan super VIP itu harus segera dirampungkan agar bulan Oktober atau November ini bisa beroperasi maksimal. "Bangunan fisik *kan* sudah. Tapi, kelas VIP masih harus ditata, sehingga bisa beroperasi sesuai rencana," katanya.

Yang paling jadi sorotan adalah masalah sumber daya manusia (SDM), tenaga medis di RS masih sangat terbatas. Tenaga yang paling minim adalah dokter spe-

sialis. "Kami dapat laporan, ada dokter spesialis yang keluar karena masalah insentifnya kecil. Kami harapkan itu jadi perhatian serius," pinta Sunarta. Karena itu pihaknya meminta rumah sakit benar-benar memperhatikan nafkah pegawainya. "Kami sarankan dokter-dokter spesialis dilengkapi. Jangan sampai RSUD Badung cuma jadi rumah sakit rujukan," tegasnya.

Beberapa dokter spesialis yang masih dibutuhkan rumah sakit di antaranya dokter spesialis jiwa, dokter spesialis rehabilitasi medik, dokter spesialis forensik, dan dokter spesialis anak, termasuk juga konsultan NICU (neonatal intensive care unit).

Sementara itu hal lain yang tak kalah jadi sorotan yakni terkait pelayanan JKBM dan JKKB Manguwaras. Pihaknya mengaku kerap mendapat laporan pasien JKBM dan JKKB tidak lagi gratis. "Iya, gimana gratis? Pasien JKKB diberi resep beli obat sendiri. Mestinya *kan* pasien JKKB itu gratis semua karena yang tidak

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015

Hal : 2



Sambungan - -

ditanggung JKBM sudah dibiayai dengan JKKB," ucapnya.

Terkait hal itu pihaknya me-
warning pihak rumah sakit agar
benar-benar menjalankan pro-
gram pemerintah. "Ingat JKKB itu
adalah suplemen JKBM. Apa yang
tidak ditanggung JKBM ditanggung
JKKB," tandasnya.

Sementara mengenai rekrut-
men 183 tenaga kontrak yang
tengah berlangsung di RSUD
Badung, Sunarta mengaku sepakat
dijaring secara ketat dengan sis-
tem online. Menurutnya seleksi
pegawai ini penting untuk mend-
apatkan tenaga yang handal dan
sesuai kompetensinya, sehingga
RSUD Badung dapat memberikan
pelayanan maksimal kepada
masyarakat.

Dikonfirmasi terpisah Dirut
RSUD Mangusada Badung dr Agus
Bintang Suryadi mengakui bila
masih kekurangan dokter, spe-
sialis. "Iya kami memang ke-
kurangan dokter spesialis seperti
dokter ahli bedah thorax, dokter
ahli bedah onkologi, dokter ahli
bedah plastik, dan lain-lain,"

akunya. Terkait dengan pelayanan
di Paviliun Mangusada tersebut,
menurut dr Bintang membutuhkan
lebih banyak lagi dokter ahli.
"Karena pelayanan di Gedung
Paviliun Mangusada bersifat spes-
ialistik dan rencana pengem-
bangan RSUD Mangusada menjadi
rumah sakit pendidikan tentu
membutuhkan lebih banyak dokter
spesialis dan sub spesialis,"
imbuhnya.

Bagaimana dengan sorotan
dewan masalah tumpang tin-
dihnya JKKB Manguwaras dan
JKBM? Dokter Bintang menyang-
kal hal tersebut. Menurut dia,
JKKB bukan kurang maksimal,
hanya prosedurnya harus me-
makai formularium JKBM dulu.
Tidak langsung memakai for-
mularium rumah sakit seperti
dulu.

"Pasien yang mendaftar dengan
menggunakan JKBM tidak bisa
mendapatkan dari JKKB. Se-
baliknya juga begitu, kalau
mendaftarnya memakai JKKB
maka tidak bisa dobel dapat dari
JKBM," jelasnya. as

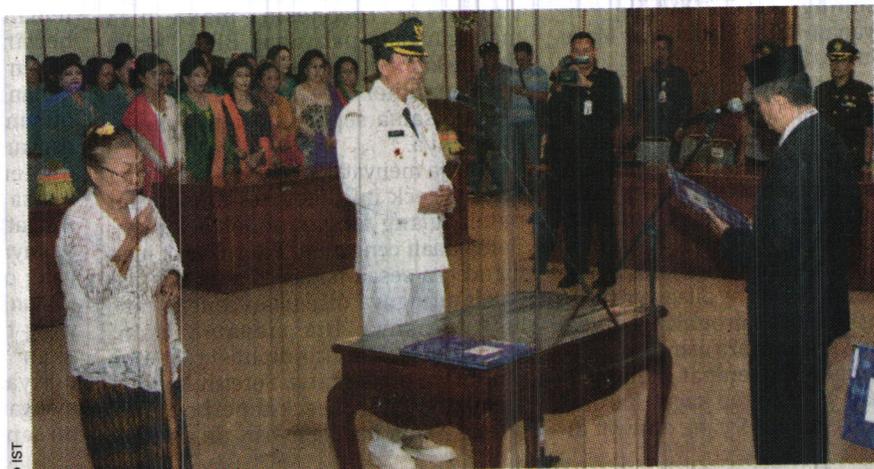
Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015

Hal : 2



Dilantik Gubernur Menjadi Penjabat Bupati Tabanan

Janji Pertahankan WTP 'Raja Arab'



Wayan Sugiada (seragam putih) saat dilantik Gubernur Pastika sebagai Penjabat Bupati Tabanan dalam seremoni di Gedung Wiswa Sabha Utama, Senin (10/8).

DENPASAR, NusaBali

Satu lagi kursi yang lowong di Bali akibat habisnya masa jabatan kepala daerah jelang Pilkada 2015, diisi oleh figur Penjabat Bupati. Kali ini, Gubernur Bali Made Mangku Pastikaantik 1 Wayan Sugiada sebagai Penjabat Bupati Tabanan, Senin (10/8), untuk menggantikan Ni Putu Eka Wiryastuti yang masa jabatannya telah habis per 9 Agustus 2015. Begitu dilantik, si 'Raja Arab' janji akan pertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Tabanan.

Pelantikan Wayan Sugiada--yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali--sebagai Penjabat Bupati Tabanan, Senin pagi, dilakukan Gubernur Pastika di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur, Niti Mandala Denpasar. Wayan Sugiada, birokrat yang dikenal sebagai pemeran 'Raja Arab' dalam Sendratari Perjuangan

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Sekesa, 11 Agustus 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

'Raja Arab' Janji Pertahankan WTP

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Cinta Grup Kesenian Birokrasi dan PKK Pemprov Bali, nantinya akan menduduki pos barunya sebagai Penjabat Bupati Tabanan sampai nanti terpilih kepala daerah definitif melalui Pilkada Tabanan, 9 Desember 2015 mendatang.

Wayan Sugiada dikukuhkan jadi Penjabat Bupati Tabanan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.51-4623 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tabanan. Berhubung Wayan Sugiada dilantik menjadi Penjabat Bupati Tabanan, maka posisinya sebagai Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali telah dialihkan Gubernur Pastika kepada Dewa Putu Eka Wijaya Wardana, dengan status Pelaksana Tugas (Plt). Saat ini, Dewa Eka Wijaya masih menjabat sebagai Asisten 1 Setda Provinsi Bali.

Dengan dilantiknnya Wayan Sugiada menjadi Penjabat Bupati Tabanan, maka tinggal satu kursi kepala daerah lowong lagi yang akan diisi figur 'penjabat' terkait habisnya masa jabatan sebelum Pilkada 2015. Yakni, kursi Penjabat Walikota Denpasar, yang akan diberikan kepada AA Gede Geria. Rencananya, AA Gede Geria yang kini Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Bali akan dilantik menjadi Penjabat Walikota Denpasar, Selasa (11/8), menggantikan IB Rai Dharmawijaya Mantra--yang habis masa jabatannya per 11 Agustus 2015.

Sebelumnya, Gubernur Pastika juga telah mengisi kursi lowong kepala daerah untuk Karangasem,

Bangli, dan Badung. Pertama, Ida Bagus Ngurah Arda (Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali) yang dilantik menjadi Penjabat Bupati Karangasem, menggantikan Wayan Geredeg (habis masa jabatan per 21 Juli 2015).

Kedua, Nyoman Harry Yudha Saka (Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali) yang dilantik menjadi Penjabat Bupati Badung untuk menggantikan AA Gde Agung (habis masa jabatan per 5 Agustus 2015). Ketiga, Dewa Gede Mahendra Putra (Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali) yang ditunjuk menjadi Penjabat Bupati Bangli untuk menggantikan I Made Gianyar (habis masa jabatan per 5 Agustus 2015).

Pelantikan Wayan Sugiada sebagai Penjabat Bupati Tabanan, Senin kemarin, dihadiri pula

Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pelayun, dan para Pejabat Eselon II Pemprov Bali. Saat pelantikan kemarin, Gubernur Pastika memberikan sejumlah pesan penting bagi Wayan Sugiada, yang notabene birokrat asal Banjar Curah, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan.

Gubernur mengingatkan bahwa tugas utama Sugiada selaku Penjabat Bupati Tabanan, bukan hanya menjalankan roda pemerintahan daerah setempat. Tapi, sekaligus bertugas menjaga netralitas apatur sipil negara atau jajaran PNS dalam pelaksanaan Pilkada Tabanan 2015. Intinya, Penjabat Bupati harus ikut menupayakan Pilkada Tabanan 2015

berjalan demokratis, profesional, dan berintegritas. "Penjabat Bupati Tabanan nanti harus jaga betul netralitas PNS di Pilkada," tandas Pastika.

Menurut Pastika, menjaga netralitas aparatur negara adalah salah satu upaya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dalam upaya mendukung Pilkada nan demokratis. "Tidak berhenti sampai di situ. Penjabat Bupati Tabanan juga harus mampu memfasilitasi Pilkada berjalan aman. Penjabat Bupati mesti koordinasikan dan mengefektifkan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan seperti KPU, Panwaslu, dan unsur TNI/Polri, termasuk dengan pemuka masyarakat serta pemuka agama di Tabanan," pinta Pastika.

Yang tak kalah penting, Sugiada selaku Penjabat Bupati Tabanan juga harus menjalin hubungan yang harmonis dengan kalangan DPRD Tabanan. Sebab, kepala daerah dan Dewan sebagai cerminan eksekutif-legislatif, mempunyai kedudukan setara dan hubungan kerja yang bersifat kemitraan. "Selain itu, Penjabat Bupati Tabanan mesti menjalin hubungan yang konstruktif dan hierarkis dengan pemerintah provinsi, sehingga terbangun sebuah manajemen pembangunan yang terintegrasi," ujar Pastika.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Pastika tak lupa menyampaikan terima kasih kepada pasangan Putu Eka Wiryastuti- I Komang Gede Sanjaya yang telah menyelesaikan masa pengabdianya sebagai Bupati-Wakil Bupati Tabanan

2010-2015, atas peran sertanya ikut sukseskan program-program pembangunan daerah sesuai visi Bali Mandara.

Sementara itu, Wayan Sugiada selaku Penjabat Bupati Tabanan berkomitmen untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit laporan keuangan tahun anggaran 2014. Janji tersebut disampaikan Sugiada se usai acara pelantikan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur, Senin kemarin.

"Mempertahankan itu lebih sulit. Makanya, kita semua harus bekerja keras, serta bersinergi antara pemerintah dan masyarakat," tandas si 'Raja Arab'. Dia menyadari bahwa untuk meraih opini WTP dari BPK, tidaklah mudah karena pemerintah daerah harus taat terhadap peraturan, tertib pengelolaan aset, dan juga tertib pengelolaan keuangan.

Tabanan di bawah Bupati Putu Eka Wiryastuti sebelumnya untuk kali pertama meraih opini WTP dari BPK, Juni 2015 lalu. Dengan opini WTP tersebut, berarti Tabanan praktis secara estafet mampu memperbaiki rapornya. Semula, Tabanan sempat sempat dganjar opini 'terendah' Disclaimer oleh BPK atas pengelolaan anggaran tahun 2012.

Setahun berikutnya, Tabanan naik kelas ke opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas pengelolaan anggaran tahun 2013. Kini, di tahun 2015, predikat Tabanan naik ke puncak menjadi opini WTP dari BPK atas audit laporan keuangan tahun anggaran 2014. **nat**

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015

Hal : 15



Dugaan Korupsi Bansos UPPO Bangli Berkasnya Lengkap, Ketua Kelompok Tani Ditahan

BANGLI, NusaBali

Kejari Bangli menyatakan berkas perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), telah lengkap. Tersangka, yakni I Nyoman Juniada yang merupakan Ketua Kelompok Tani Bina Winangun Banjar Taksu, Desa Batur Tengah, Kintamani, Bangli pun langsung ditahan.

Pantauan di Kantor Kejari Bangli, pelaku sebelum dimasukkan ke dalam mobil tahanan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di salah satu ruangan di Kejari Bangli. Sekitar pukul 14.00 Wita, pelaku didampingi petugas kejaksaan langsung digiring menuju mobil tahanan.

Selanjutnya, tersangka dugaan korupsi dana UPPO ini langsung digiring menuju Rumah Tahanan (Rutan) Bangli. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangli, IAK Ratna Sari K Dewi didampingi Kasi Pidsus, Bagus Putra kepada wartawan mengatakan berkas perkara dari tersangka dugaan korupsi bantuan dana pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), I Nyoman Juniada ini dinilai sudah lengkap. Karenanya, pihaknya melakukan penahanan terhadap tersangka sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT/83/P.1.13/Ft.1/08/2015.

Lebih lanjut dijelaskan, dana yang diduga disalahgunakan tersangka bersumber dari Kementerian Pertanian melalui Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian tahun 2012. Saat itu, Kelompok Tani Bina Winangun digelontor bantuan unit pengolahan pupuk organik.

Dana tersebut langsung dikucurkan oleh pusat kepada kelompok tani dan telah disetujui oleh Dinas P3 Bangli. Sesuai petunjuk teknis bantuan senilai Rp 340 juta dipergunakan untuk kegiatan pengadaan sepeda motor roda tiga, kandang koloni, bak fermentasi, rumah kompos dan 35 ekor sapi. Namun dalam pengelolaannya, dana tersebut ternyata disalahgunakan oleh yang bersangkutan alias melenceng dari Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

"Dari hasil audit BPKP, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 340 juta," ujarnya. Bagus Putra menambahkan dalam pemeriksaan, tersangka Juniada mengakui semua perbuatannya. Salah satunya, penggunaan dana Rp 25 juta, telah dimanfaatkan untuk membayar kredit ketahanan pangan.

Tersangka mengaku memiliki utang (kredit) Rp 83 juta. Di-



• NUSABALI/DEWA DARMAWAN

TERSANGKA, I Nyoman Juniada saat digiring menuju mobil tahanan menuju Rutan Bangli, Senin (10/8).

singgung soal tersangka lain, kata Bagus Putra, saat ini pihaknya baru melakukan penahanan terhadap satu tersangka. Munculnya tersangka lain sangat tergantung dari proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan fakta-fakta yang didapat saat persidangan nanti. Seperti diketahui, Polres Bangli dalam kasus penyalahgunaan dana bansos UPPO telah menetapkan dua tersangka, yakni I Nyoman Juniada dan seorang pejabat di Pemkab Bangli berinisial IWS. **cr53**



Hibah Dewan Rp 203,5 M Lolos

★ Per Anggota Dijatah Rp 3,7 Miliar

"Ingat bukan milik Dewan dana itu. Dewan tidak punya Bansos atau Hibah. Yang benar itu dana Hibah yang direkomendasikan Dewan"

(Anak Agung Ngurah Adi, Anggota Fraksi PDIP)

DENPASAR, NusaBali

Ini dia hasil manuver DPRD Bali ketika membuat rapat dengan Eksekutif deadlock beberapa waktu lalu. Dana Bansos/Hibah DPRD Bali di APBD Induk 2016 dipastikan lolos. Hibah yang

dijatah Rp 3,7 miliar per anggota Dewan tersebut dipastikan terakomodir. Jumlah total untuk 55 anggota DPRD Bali dari APBD Induk 2016 akan terkucurkan Rp 203,5 miliar. Belum lagi dana Bansos/Hibah Rp 750 juta di APBD Perubahan 2015 juga lolos.

Sejumlah anggota DPRD Bali mengakui kepastian lolosnya dana Hibah tersebut Wakil Ketua Fraksi Pancabayu, I Nyoman Tirtawan di Gedung DPRD Bali, Senin (10/8) mengatakan, dana Bansos/Hibah itu pasti terakomodir. Namun kata dia, untuk di APBD Perubahan jumlahnya tidak banyak. Sebab kalau dibagi di masyarakat angkanya sangat minim. "Cuma jumlahnya memang tidak banyak di Perubahan 2015. Tercecer, kecil-kecil Kalau diberikan ke masyarakat ya jumlah sangat kecil," ujar Tirtawan

didampingi rekannya Anak Agung Ngurah Adi dari Fraksi PDIP.

Sementara Ngurah Adi menegaskan, dana Bansos/Hibah Rp 3,7 miliar pasti terakomodir dan tanpa ada diskriminatif. Namun, kata dia, dana tersebut bukan milik Dewan. "Ingat bukan milik Dewan dana itu. Dewan tidak punya Bansos atau Hibah. Yang benar itu dana Hibah yang direkomendasikan Dewan," ujar politisi asal Puri Gerenceng Denpasar yang duduk di Komisi II membidangi BUMD dan pajak daerah serta pariwisata.

Ngurah Adi mengatakan, Bansos/Hibah ini nanti penyalurannya sangat selektif untuk meminimalisir pelanggaran. "Angka Rp 3,7 miliar itu sudah pasti. Nanti selektif pemberiannya kepada masyarakat Karena sekarang ini ada pemeriksaan yang ketat

dengan proposal," kata Ngurah Adi.

Bansos atau Hibah sebesar Rp 3,7 miliar yang akan terwujud di 2016, menurut anggota Komisi III DPRD Bali I Wayan Kariartha, bakal dikawal penuh. Sebab dana ini untuk kepentingan masyarakat DPRD Bali diakui Kariartha harus melakukan rapat beruangkali dengan pimpinan Dewan dan Eksekutif untuk menggolkan dana untuk kepentingan masyarakat ini. "Kita rapat berkali-kali dan kita sampaikan kepada pimpinan bahwa dana Bansos atau Hibah ini sangat penting," ujar Kariartha.

"Akhirnya terakomodir. Tetapi kita harus kawal dan saya sampaikan kepada pimpinan jangan diutak-atik lagi. Dulu kan sempat mau dikurangi. Kami sampaikan tidak boleh dikurangi. Untunglah pimpinan kita mengerti dan visinya sama," ujar Kariartha.

Politisi asal Kelurahan Padangsambian, Denpasar Barat ini menyebutkan, dana Hibah untuk masyarakat secara administrasi negara murni disalurkan kepada masyarakat Tidak ada sepeserpun disentuh Dewan. "Bukan milik Dewan dana itu. Selama ini banyak yang salah persepsi. Dewan tidak pegang uang itu. Ada mekanisme, proses administrasi yang disalurkan langsung ke rekening masyarakat sesuai dengan kegiatan di masyarakat," ujar politisi PDIP yang mantan anggota DPRD Denpasar dua periode ini.

Terkait dengan lolosnya dana Hibah untuk anggota Dewan ini, Ketua Tim Anggaran Daerah yang juga Sekprov Bali Tjokorda Ngurah Pelayun belum bisa dimintai komentar. Saat dihubungi NusaBali melalui ponselnya tidak aktif. **nat**

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015
Hal : 3



Kontraktor Cantik Langsung Ditahan

★ Tiga Kali Mangkir dalam Sidang Dugaan Korupsi
Jembatan Lemukih, Buleleng



KONTRAKTOR, Aristya Agustina (kiri) saat beri kesaksian terhadap terdakwa Made Suwitra, PPK proyek Jembatan Desa Lemukih, Buleleng dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (10/8).
● NUSABALI/YUDA

**Aristya mengaku
mendapat laporan
konsultan
pengawas jika
proyek sudah
rampung 45 persen,
Namun
kenyataannya baru
selesai 20 persen.**

DENPASAR, NusaBali
Setelah 3 kali mangkir sidang, Aristya Agustina (rekanan) yang merupakan saksi kunci dan ter-

batan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Buleleng. "Saya Direktur PT Aristya Ayu Prima yang memenangkan tender proyek ini," jelasnya di awal sidang.

Ia mengatakan pembangunan jembatan ini dimulai pada Agustus 2012 dengan 135 hari pengerjaan dan nilai kontrak Rp 2,5 miliar. Setelah berjalan hingga November, Aristya mensubkontrakkan proyek ini kepada Made Sudiawan yang merupakan kontraktor asli Buleleng. Kontraktor cantik ini mengaku tidak mampu melanjutkan proyek karena medan yang sulit dan uang muka yang belum dibayarkan.

sangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng dengan tersangka PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), I Made Suitra akhirnya hadir dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Senin (10/8). Kontraktor cantik asal Siodarjo, Jawa Timur ini juga langsung ditahan di Polda Bali karena dianggap tidak kooperatif.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim, Gede Ariyadi, mengagendakan pemeriksaan saksi kunci Aristya dan saksi ahli dari BPKP. Aristya yang diperiksa pertama mengaku sebagai pemenang tender pembangunan jem-

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015

Hal : 5



Sambungan - - -

"Saya resmi mensubkontrakkan proyek ini di hadapan notaris pada November 2012," jelasnya. Setelah disub kontrakkan, I Made Sudiawan mulai mengerjakan proyek ini dan hingga Desember yang merupakan batas akhir pengerjaan. Aristya mengaku mendapat laporan konsultan pengawas jika proyek ini sudah rampung 45 persen. Namun kenyataannya di lapangan proyek ini baru selesai 20 persen.

Pada Desember 2012, uang muka proyek Rp 500 juta cair disusul dengan pembayaran termin I Rp 800 juta. Masalah timbul dalam laporan yang dibuat kontraktor asal Sidoarjo yang memasukkan pengerjaan proyek yang sudah mencapai 45 persen. Padahal di lapangan baru rampung 20 persen. Bahkan, karena lambatnya pengerjaan, PPK akhirnya memutuskan kontrak PT Aristya Ayu Prima ini setelah pembayaran termin I. "Saya ajukan permohonan tidak mampu dan kontrak saya diputus,"

jelasnya.

Majelis hakim sempat menanyakan kelebihan pembayaran yang diterima. Aristya lalu menj-

awab jika uang kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk membiayai proyek hingga rampung 45 persen di bulan

Februari 2013. "Jadi proyek itu selesai pada Februari dengan menggunakan uang kelebihan itu," ujar Aristya.

Namun JPU, AA Alit langsung memotong jawaban Aristya dan mengatakan jika kontraknya sudah diputus pada Desember 2012 akhir, sehingga tidak mungkin masih bisa mengerjakan proyek tersebut. "Saya masih cinta Singaraja. Makanya saya lanjutkan lagi," ujar wanita cantik yang bersaksi menggunakan baju t-shirt panjang dan celana jeans ini.

Usai sidang, Aristya yang sempat 3 kali mangkir panggilan sidang langsung dibawa beberapa penyidik ke tahanan Poldabali. Kuasa hukumnya, Made Sudana dkk mengatakan setelah mangkir 3 kali sidang, pihak kepolisian langsung menjemput Aristya ke rumahnya di Sidoarjo, Jatim pada, Rabu (6/8) lalu. "Dari Rabu kemarin langsung ditahan di Poldabali. Sambil menunggu berkasnya rampung dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bali," jelasnya saat ditemui usai sidang. rez

Terjerat Laporan Fiktif

DALAM dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di hadapan majelis hakim pimpinan Beslin Sihombing dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Senin (15/6) lalu, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), I Made Suitra didakwa melakukan penyelewengan anggaran untuk pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng.

Modus yang digunakan terdakwa asal Yeh Embang, Buleleng bersama rekanan dan

PPTK yang juga sudah dijadikan tersangka, yaitu dengan membuat laporan fiktif pembangunan jembatan ini. Proses pembangunan jembatan tahap I yang seharusnya menyelesaikan 40 persen pembangunan, hanya diselesaikan 20 persen saja. Namun dalam pertanggung jawabannya, para tersangka membuat laporan fiktif seolah-olah pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak.

Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan Rp 669 juta. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal primer

yaitu pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b UU no 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dirubah dengan UU Tahun 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara dalam dakwaan subsidiar, ketiga terdakwa dijerat pasal 3 UU yang sama. Selain Suitra, ada dua tersangka lain dalam kasus ini, yaitu Aristya Agustina (rekanan) dan I Wayan Wenten sebagai PPTK yang masih dalam proses penyidikan Dit Reskrimsus Poldabali. rez

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015

Hal : 5



Pledoi Tim 9 dalam Kasus Korupsi Dermaga Klungkung Dakwaan JPU Diibaratkan Elang Terbang dengan Satu Sayap



• NUSABALI/YUDA
TIGA dari 9 terdakwa anggota Tim 9, I Ketut Janapria, I Made Ngurah dan AA Sagung Mastini mengikuti sidang dengan agenda pledoi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (10/8).

DENPASAR, NusaBali

Setelah dituntut dengan hukuman berbeda pada sidang sebelumnya, 9 terdakwa yang merupakan Tim 9 (Panitia Pengadaan Lahan) Dermaga Gunaksa, Klungkung menyampaikan pledoi (pembelaan) dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (10/8). Dalam pledoi, kuasa hukum 9 terdakwa, Simon Nahak dkk menyebut tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bagaikan burung elang yang terbang dengan satu sayap.

Tim sembilan ini membacakan pledoi secara terpisah. Terdakwa eks Sekda Klungkung yang juga merupakan Ketua Panitia Pengadaan Lahan, Ketut Janapria, eks Ketua BPN Klungkung/Wakil Ketua II AA Sagung Mastini dan Made Ngurah (eks Asisten I/Wakil Ketua I) sampaikan pledoinya masing-masing dalam sidang yang dipimpin hakim, Beslin Sihombing serta anggota, Sumadi dan Hartono.

Sementara pada berkas perkara kedua dengan empat terdakwa, yaitu terdakwa Anak Agung Ngurah Agung, I Nyoman Rahayu, Made Sugiarta dan I Nyoman Sukantra. Untuk berkas perkara kedua ini disidangkan oleh majelis hakim yang diketuai Putu Gde Haryadi dan anggota, Achmad Peten Sili serta Miptahul Holis. Untuk berkas perkara ketiga, berisikan

dua terdakwa, yakni terdakwa I Gusti Ngurah Gede dan I Gusti Gde Wiratmadja.

Terhadap perkara ini disidangkan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Cening Budiana dan anggota Miftahul dan Nurbaya. Ditemui usai pembacaan pledoi, kuasa hukum 9 terdakwa, Simon Nahak dkk mengatakan dalam pledoi meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman bebas atau onslag (ada perbuatan hukum tapi bukan perbuatan pidananya).

Beberapa catatan juga diberikan oleh Simon, di antaranya soal JPU yang hanya membuktikan pasal subsider, yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah menjadi UU RI No 20 tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1, ke-1 KUHP. Padahal seharusnya JPU harus bisa membuktikan pasal primer dan subsidernya. "Ini bagaikan elang yang terbang dengan satu sayap, jadi dipastikan akan jatuh. Mengapa jatuh karena dakwaan tidak lengkap," ujar Simon dengan percaya diri. Selain itu, beberapa kejanggalan lainnya diungkap di antaranya tidak adanya kerugian negara yang dinikmati pada terdakwa. Sidang akan kembali dilanjutkan hari ini, Selasa (11/8) dengan agenda replik (tanggapan) dari JPU. rez

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015

Hal : 5



Serapan Anggaran Masih Rendah

★ Dewan Khawatir 'Kejar Tayang'

Selama satu semester pertama serapan anggaran masih di bawah 50 persen. Kondisi itu diyakini berpengaruh pada kinerja eksekutif pada semester II periode Agustus-Desember bakal 'kejar tayang' capai target serapan.



RAPAT kerja evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan semester I di gedung Unit IV Kantor Bupati kemarin.

SINGARAJA, NusaBali

Kinerja eksekutif kini menjadi sorotan lembaga DPRD Buleleng. Masalahnya, serapan anggaran pada semester I periode Januari-Juli tahun 2015, masih di bawah angka 50 persen. Dewan pun khawatir, kondisi itu akan ber-

pengaruh pada kinerja eksekutif pada semester II periode Agustus-Desember, dimana terapkan pola 'kejar tayang' dalam pencapaian target serapan. "Logikanya dalam setahun itu 100 persen, artinya dalam enam bulan pertama semestinya sudah mencapai

50 persen. Tapi ini masih dibawah 50 persen, kami khawatir nanti ada pola kejar tayang dalam pencapaian target serapan," ungkap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng, Putu Mangku Mertayasa, Senin (10/8).

Disebutkan, dari laporan eval-

uasi pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan lingkup Pemkab Buleleng semester I di tahun 2015, yang telah diterima, serapan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa secara umum berada di angka 34 persen, dengan total anggaran sebesar Rp 550 miliar lebih dari total APBD sebesar Rp 1,8 triliun lebih. Dengan serapan yang rendah itu, dikawatirkan akan terjadi program atau kegiatan di semester II yang dikebut atau kejar tayang untuk pencapaian target. "Ini kan sangat rendah. Apa mungkin dengan siswa waktu yang ada ini semua anggaran bisa terserap," ujar politisi PDIP asal Desa/kecamatan Banjar ini.

Mangku Mertayasa justru khawatir jika anggaran tidak terserap sesuai target, akan terjadi Silpa (sisa lebih pagu anggaran) yang cukup tinggi. Jika itu terjadi, justru program atau kegiatan terutama dalam pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan target pencapaian.

Sementara secara terpisah, Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjindra usai rapat kerja evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan semester I, di gedung Unit IV Kantor Bupati justru mengatakan, kinerja dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah di atas rata-rata. Bahkan dua kecamatan yakni Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Sawan sudah melebihi target. "Bahkan per akhir Juli sudah ada yang mencapai 62 persen dan ada sudah mencapai 70 persen baik dari capaian fisik maupun capaian keuangan," ungkapnya.

Rapat tersebut dihadiri juga Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka dan Kepala Bappeda Buleleng, Gde Darmaja dengan menghadirkan seluruh pimpinan SKPD. Dalam rapat tersebut, Kepala Bappeda Gede Dharmaja memaparkan pencapaian dan realisasi keuangan serta realisasi fisik di masing-masing SKPD. Disebutkan, pencapaian realisasi telah mencapai 50 persen. **k19**

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015

Hal : 4



PT Denpasar Kuatkan Putusan Pengadilan Tipikor

★ Terkait Banding Kasus RPH Temesi Gianyar



AA Rai Asmara dan IB Raka saat jalani sidang, beberapa waktu lalu.

DENPASAR, NusaBali

Banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap vonis dua terpidana kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Rumah Potong Hewan (RPH) Temesi, Gianyar masing-masing AA Rai Asmara (mantan Sekda Gianyar) dan IB Raka (mantan Kadis Peternakan) tidak membuahkan hasil. Pasalnya Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Denpasar sebelumnya yang memvonis kedua terdakwa selama 1 tahun tanpa uang pengganti.

Hal ini diungkapkan Kasipidsus Kejari Gianyar, Herdian Rahardi pada Selasa (7/7) lalu. Ia mengatakan sudah menerima pemberitahuan dari PT Denpasar terkait putusan banding yang diajukan

JPU. Dalam pemberitahuan tersebut, PT Denpasar menguatkan putusan sebelumnya. "Jadi vonisnya tetap 1 tahun tanpa uang pengganti," jelasnya.

Ditanya apakah akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), Herdian mengatakan masih akan melakukan koordinasi dengan atasannya. Namun Herdian mengirim sinyal tidak akan menempuh jalur kasasi karena menurutnya putusan PT Denpasar sudah tepat.

"Memang keduanya tidak pernah menerima keuntungan apapun. Tapi kami tetap akan koordinasikan dulu apakah akan kasasi atau tidak," pungkasnya. Seperti diketahui, banding yang dilakukan JPU ini karena vonis yang dijatuhkan jauh dari tuntutan yang

diajukan. Dalam tuntutan, eks Sekda Asmara dituntut 1,5 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara. Sementara eks Kadisnak, IB Raka dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara ditambah mengembalikan kerugian negara Rp 42 juta.

Namun dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar pimpinan Early Sulistyorini menjatuhkan vonis jauh dibawah tuntutan. Dalam amar putusannya, Asmara divonis satu tahun dan IB Raka divonis 1 tahun tanpa pengembalian kerugian negara. Nah, vonis IB Raka inilah yang akhirnya menjadi pertimbangan JPU melakukan banding dalam kasus ini.

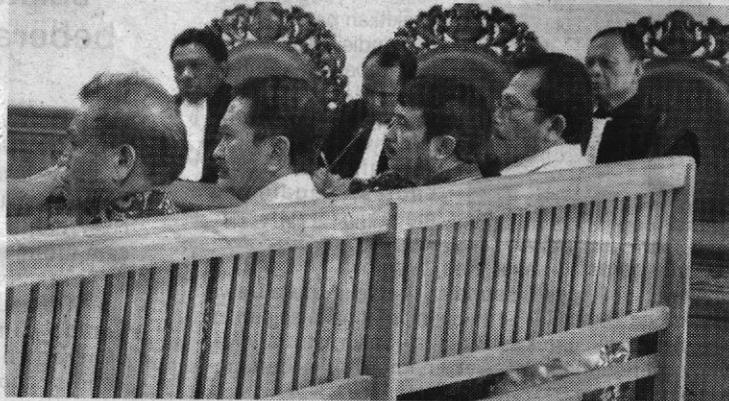
Seperti diketahui, kasus ini berawal dari pengadaan lahan untuk pembangunan RPH di Temesi, Gianyar pada 2002. Dalam pengadaan ini, dianggarkan Rp 3 miliar untuk membebaskan 299 are lahan untuk RPH. Namun kenyataannya, lahan yang dibebaskan hanya 247,15 are dengan dana sekitar Rp 2,46 miliar.

Dengan perhitungan tersebut, ada selisih kelebihan pembayaran Rp 486 juta. Selain menetapkan AA Rai Asmara (mantan Sekda Gianyar dan Ketua Panitia Pengadaan Lahan) dan IB Raka (mantan Kadis Peternakan dan Sekretaris Pengadaan Lahan) sebagai tersangka, makelar tanah, Kadek Aristana juga ikut menjadi pesakitan dalam kasus ini. **rez**

Edisi : SABTU 4/11/2015
Hal : 5



Sidang Dugaan Korupsi Dermaga Gunaksa **Tim 9 Batal Hadirkan Saksi Meringankan**



TERDAKWA Tim 9 jalani persidangan di pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin. ● NUSABALI/YUDA

DENPASAR, NusaBali

Sidang dugaan korupsi Dermaga Gunaksa, Klungkung dengan terdakwa Tim 9 (Panitia Pengadaan Tanah) ditunda untuk selanjutnya dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya, dalam sidang yang digelar Kamis (9/7) dan Jumat (10/7), kuasa hukum kesembilan terdakwa batal menghadirkan saksi meringankan. Hal ini ditegaskan kuasa hukum Tim 9, Simon Nahak dkk yang mengatakan batal menghadirkan saksi meringankan karena beberapa alasan. Diantaranya, semua kliennya yang merupakan anggota Tim 9 yaitu I Ketut Janapria (Sekretaris Daerah sebagai ketua pengadaan tanah), AA Sagung Mastini (mantan Kepala BPN Klungkung sebagai

anggota) Made Ngurah (mantan asisten I Peinkab Klungkung sebagai anggota), AA Ngurah Agung (Kadis Pekerja Umum Klungkung sebagai anggota), Nyoman Rahayu (Kadis DKP sebagai Anggota), Made Sugiarta (mantan kepala Bapeda Klungkung sebagai anggota), IGN Wiratmaja (mantan Kabag Tapem sebagai anggota), Nyoman Sukantra (mantan Kepala Badan Pendapatan dan Pesedahan Agung sebagai anggota), dan IGde Ngurah (Kasi di BPN Klungkung sebagai anggota) sudah mengakui kesalahannya. "Jadi kami batal menghadirkan saksi meringankan," tegasnya. Dengan demikian, sidang akan kembali dilanjutkan Selasa (28/7) mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU. rez

Edisi : Sabtu, 11 Juli 2015
Hal : 5